



**PENGARUH KAPASITAS INTELEKTUAL SUMBER DAYA MANUSIA,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP NILAI  
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**SKRIPSI**

oleh

**Firna Dwi Prestisia  
NIM 100810301095**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2014**



**PENGARUH KAPASITAS INTELEKTUAL SUMBER DAYA MANUSIA,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP NILAI  
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

oleh

**Firna Dwi Prestisia  
NIM 100810301095**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2014**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Drs. H. Suradji, M.M. dan Ibu Hj. Sri Hayati S.pd, tercinta dan tersayang, terima kasih atas kasih sayang, dukungan, nasehat dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah bagi keberhasilanku;
2. Kakakku tercinta yang selalu mendukung, serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala perhatian dan doanya;
3. Bapak Sukirman, Almarhum Ibu Nurhayani dan Oktavian Tri Cahyo tersayang, yang selalu member nasehat, dukungan, bantuan dalam segala hal dan semangat untuk segera menyelesaikan studi;
4. Dosen Pembimbing ku Ibu Bunga Maharani, S.E., M.SA. dan Ibu Andriana, S.E., M.Sc. Ak. dan Dosen Wali Ibu Dr. Yosefa Sayekti M.Com., Ak. yang telah memberikan ilmu, waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing ku dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perhatian dan tanggung jawab yang tinggi;
5. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**MOTTO**

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(Q.S Al-Insyirah 6-7)

Tidak penting seberapa lambat Anda berjalan, selama Anda tidak berhenti.

(Confucius)

It's nice to be important, but it's more important to be nice

(John Cassis)

Attitude changes everything!

(Unknown)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firna Dwi Prestisia

NIM : 100810301095

Jurusan : S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Pengaruh Kapasitas Intelektual Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 November 2014

Yang menyatakan,

Firna Dwi Prestisia  
NIM 100810301095

**SKRIPSI**

Oleh

Firna Dwi Prestisia

NIM 100810301095

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Bunga Maharani, S.E., M.SA.

Dosen Pembimbing II : Andriana, S.E., M.Sc., Ak.

**TANDA PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : PENGARUH KAPASITAS INTELEKTUAL SUMBER  
DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
SITUBONDO

Nama Mahasiswa : Firna Dwi Prestisia

Nomor Induk Mahasiswa : 100810301095

Jurusan : Akuntansi / S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Bunga Maharani, S.E., M.SA.  
NIP 19850301 201012 2 005

Andriana, S.E., M.Sc., Ak.  
NIP 19820929 201012 2 002

Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Alwan S. Kustono, SE., M.Si., Ak.

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**PENGARUH KAPASITAS INTELEKTUAL SUMBER DAYA MANUSIA,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Firna Dwi Prestisia  
NIM : 100810301095  
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

**26 Januari 2015**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua : **Novi Wulandari Widiyanti, SE, M.Acc & Fin** (.....)  
NIP. 19801127 200501 200 3

Sekretaris : **Drs. Djoko Supatmoko, M.M, Ak.** (.....)  
NIP. 19550227 198403 1 001

Anggota : **Drs. Imam Mas'ud, M.Si, Ak.** (.....)  
NIP. 19591110 198902 1 001

Mengetahui/ Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan

**Dr. Moehammad Fathorrazi, SE, M.Si.**  
NIP 19630614 199002 1 001



*Firna Dwi Prestisia*

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh kapasitas intelektual sumber daya manusia terhadap nilai informasi LKPD, (2) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi LKPD dan (3) Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah daerah terhadap nilai informasi LKPD. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di Kabupaten Situbondo. Pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling*, dengan jumlah responden 126. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan staf keuangan. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi berganda dengan uji t.

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan nilai signifikan secara berurutan untuk kapasitas intelektual sumber daya manusia 0,000, untuk pemanfaatan teknologi informasi 0,000 dan untuk sistem pengendalian intern pemerintah 0,040.

**Kata Kunci:** Kapasitas Intelektual SDM, Pemanfaatan TI, SPIP, Nilai Informasi LKPD

***Firna Dwi Prestisia***

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine : ( 1 ) The effect of the intellectual capacity of human resources of the information value of local government financial statements, ( 2 ) Effect of utilization of information technology to the value of information and local government financial statements ( 3 ) The effect of the internal control system of government of the information value of financial statements local government. This type of research is classified to be causative research.*

*The population in this study are all sectors in Situbondo. The sample selection was purposive sampling method, the number of respondents 126. The data used in this study are primary data. Data collection techniques with engineering survey by distributing questionnaires to SKPDs Financial Officer, Assistant Administration Officer Financial Administration SKPDs and staff of financial. Data analysis techniques using multiple regression with t test.*

*The results of this study be obtained that the intellectual capacity of human resources, the utilization of information technology and internal control system of government has positive influence on the value of the local government 's financial statement information. With significant value in sequence to the human resource capacity of 0,000, to 0,000 and the use of information technology for the internal control system of government 0,040.*

**Keywords :** *Intellectual Capacity Of Human Resources , Utilization of IT, SPIP, Value Information The financial statements of local governments.*

**RINGKASAN**

**Pengaruh Kapasitas intelektual sumber daya manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;** Firna Dwi Prestisia; 100810301095; 75 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar korporasi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dibuat harus menyediakan informasi yang dapat dipahami dan digunakan bagi para pengguna laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan para pemakai, karena nantinya laporan keuangan yang dihasilkan akan dijadikan sebagai dasar untuk membuat keputusan. Dalam pembuatan laporan keuangan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar laporan keuangan yang dihasilkan nantinya dapat memenuhi karakteristik kualitatif. Hal tersebut adalah kapasitas intelektual sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi yang ada dan sistem pengendalian intern pemerintah daerah itu sendiri.

Penelitian ini tergolong penelitian yang bersifat kausatif. Penelitian kausatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan sebab akibat dari satu variabel dengan variabel lainya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang didapatkan langsung oleh peneliti dengan cara menyebar kuisisioner ke responden. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan sampel yang diambil, yaitu seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD di Kabupaten Situbondo.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan uji t. Uji t menguji apakah variabel independen (X) secara individu

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Berdasarkan beberapa analisis data, didapatkan hasil bahwa kapasitas intelektual sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan yang dibuktikan dengan hasil perhitungan regresi dengan tingkat signifikansi 0,000, untuk pemanfaatan teknologi informasi juga didapatkan hasil bahwa variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang dibuktikan dengan hasil dengan tingkat signifikansi 0,000 dan yang terakhir untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah daerah juga berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang dibuktikan dengan hasil dengan tingkat signifikansi 0,040.

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kapasitas Intelektual Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo”. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut.

1. Bapak Dr. M. Fathorrazi, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Ahmad Roziq, SE, M.M, Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
4. Ibu Bunga Maharani, S.E., M.SA. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Andriana, S.E., M.Sc., Ak. yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, kritik, dan saran dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak. Selaku Dosen Wali selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember, beserta seluruh staf karyawan yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama perkuliahan.
7. Guru-guru sejak taman kanak-kanak hingga tingkat perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmunya.
8. Kedua orang tuaku Bapak Drs. H. Suradji, M.M. dan Ibuku Hj. Sri Hayati, S.pd, terima kasih atas segala kasih sayang, motivasi, dukungan, doa, dan segala upaya

baik secara materi ataupun non materi yang tidak terhingga selama ini.

9. Kakakku Redira Eka Krisandi, S.H. yang selalu memberikan dukungan, semangat dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Sukirman dan Almh. Ibu Nurhayani, terimakasih atas semangat yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
11. Oktavian Tri Cahyo, S.E. yang begitu setia menemani dan memberikan semangat kepada penulis, terimakasih atas perhatian, kesabaran dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini, sukses selalu untukmu.
12. Sahabat-sahabat terbaikku, teman-teman Jurusan Akuntansi yang telah memberikan berbagai masukan selama penulisan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik tenaga maupun pikiran dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember, 19 Nopember 2014

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>DOKUMENTASI KELULUSAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xi
<b>PRAKATA</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	7
2.1.1 Laporan Keuangan .....	7
2.1.2 Nilai Informasi.....	8

2.1.3 Kapasitas intelektual sumber daya manusia .....	10
2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	11
2.1.5 Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan .....	12
<b>2.2 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>12</b>
<b>2.3 Kerangka Konseptual .....</b>	<b>15</b>
<b>2.4 Pengembangan Hipotesis .....</b>	<b>15</b>
2.4.1 Pengaruh Kapasitas intelektual sumber daya manusia terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan .....	15
2.4.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan .....	16
2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan .....	17
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b>	
<b>3.1 Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>19</b>
<b>3.2 Populasi dan Sampel .....</b>	<b>19</b>
<b>3.3 Instrumen Penelitian .....</b>	<b>19</b>
<b>3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....</b>	<b>20</b>
3.4.1 Varibel Independent .....	20
3.4.2 Variabel Dependent .....	22
<b>3.5 Metode Analisis Data .....</b>	<b>22</b>
3.5.1 Pengujian Instrumen .....	22
3.5.2 Uji Asumsi Klasik .....	23
3.5.3 Uji Hipotesis .....	25
3.5.4 Koefisien Determinasi .....	26
<b>3.6 Kerangka Pemecahan Masalah .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .....</b>	<b>29</b>
4.1.1. Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Situbondo .....	29
4.1.2 Gambaran Umum Responden Penelitian .....	30



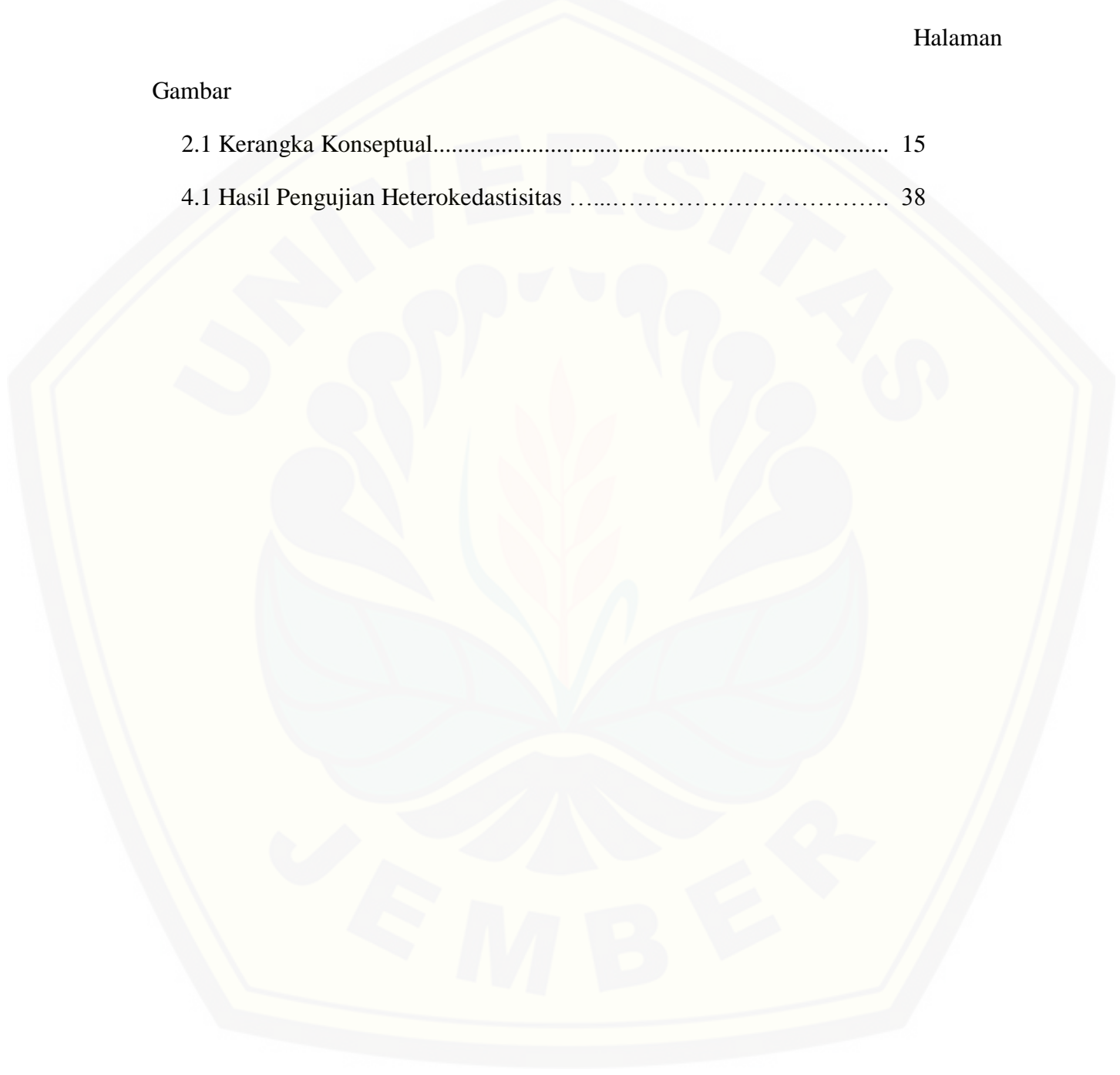
4.1.3 Hasil Pengujian Kualitas Data.....	34
4.1.4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik .....	36
4.1.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	39
4.1.6 Uji f.....	40
4.1.7 Uji t.....	41
<b>4.2 Pembahasan .....</b>	<b>42</b>
4.2.1 Pengaruh Kapasitas Intelektual Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.....	42
4.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo .....	44
4.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo .....	45
<b>BAB 5. KESIMPULAN .....</b>	<b>47</b>
5.1 Kesimpulan .....	47
5.2 Keterbatasan .....	48
5.3 Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel	
1.1 Kelompok Temuan Akibat Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan Keuangan pada Tahun 2012	3
1.2 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2010-2012 .....	4
4.1 Rincian Daftar SKPD .....	31
4.2 Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kuesioner .....	32
4.3 Gambaran Umum Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ...	32
4.4 Gambaran Umum Identitas Responden Berdasarkan Usia .....	33
4.5 Gambaran Umum Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan .....	33
4.6 Gambaran Umum Identitas Responden Berdasarkan Jabatan.....	33
4.7 Gambaran Umum Identitas Responden Berdasarkan Lama Menduduki Jabatan .....	34
4.8 Hasil Pengujian Validitas .....	34
4.9 Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen .....	36
4.10 Hasil Pengujian Normalitas.....	37
4.11 Hasil Pengujian Multikolinieritas.....	37
4.12 Hasil Ringkasan Analisis Regresi Linier Berganda .....	39
4.13 Hasil Uji F .....	41
4.14 Rekapitulasi Hasil Uji t .....	41

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar	
2.1 Kerangka Konseptual.....	15
4.1 Hasil Pengujian Heterokedastisitas .....	38



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran	
1. Kuesioner.....	51
2. Rekapitulasi data responden .....	57
3. Rekapitulasi jawaban responden .....	60
4. Hasil uji validitas .....	72
5. Hasil uji reliabilitas .....	77
6. Hasil uji asumsi klasik .....	78
7. Hasil analisis regresi linier berganda .....	80

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*). Hal ini mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Akuntabilitas dalam konteks organisasi pemerintahan yaitu pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan daerah kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya dapat terpenuhi (Mardiasmo, 2004). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yaitu berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Oleh karena itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dibuat harus menyediakan informasi yang dapat dipahami dan digunakan bagi para pengguna laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Dalam pengelolaan keuangan daerah,

pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan informasi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dipahami dan dapat digunakan oleh pemakai dan pemakai mempercayai informasi tersebut. Bermanfaat atau tidaknya informasi hanya dapat ditentukan secara kualitas dalam hubungannya dengan keputusan pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi yang disajikan tersebut.

Informasi akuntansi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain :

- a. Relevan, yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- b. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- c. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang dimuat dalam laporan keuanganakan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- d. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Apabila informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah sudah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh akan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Kelompok Temuan Akibat Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada Pemeriksaan Keuangan pada Tahun 2012

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (Juta Rp)
1.	Kerugian Daerah	578	390.331,70
2.	Potensi Kerugian Daerah	103	295.701,83
3.	Kekurangan Penerimaan	299	131.932,13
4.	Administrasi	693	-
5.	Ketidakhematan	85	58.397,28
6.	Ketidakefisienan & Ketidakefektifan	113	295.561,65
<b>Jumlah</b>		<b>1871</b>	<b>1.171.924,59</b>

*Sumber: BPK RI (2014)*

Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2012, dinyatakan bahwa terhadap 415 LKPD yang diperiksa, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 113 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 267 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 4 entitas, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 31 entitas. Dari data di atas terlihat data opini LKPD dari tahun 2010-2012.

Tabel 1.2. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2010-2012

LKPD (Tahun)	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2010	34	7	341	65	26	5	121	23	522
2011	67	13	349	67	8	1	100	19	524

---

2012	113	27	267	64	4	1	31	8	415
------	-----	----	-----	----	---	---	----	---	-----

---

*Sumber: BPK RI (2014)*

Meskipun presentase perolehan WTP meningkat dari tahun ke tahun, tetapi hal ini masih jauh dari harapan. Penyebab fenomena tersebut bisa saja terjadi karena ketidakefisienan penggunaan anggaran, penyimpangan administrasi dan masih lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah daerah (Yosefrinaldi, 2008).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan, diantaranya oleh Andriani (2010) yang menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia secara signifikan memiliki pengaruh terhadap validitas laporan keuangan pemerintah daerah dan penggunaan teknologi informasi secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Arfianti (2011) yang menyatakan bahwa SPI berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Kapasitas Intelektual Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo”**. Peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi ini dikarenakan penelitian mengenai pengaruh kapasitas intelektual sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan hasilnya masih belum konsisten dalam penelitiannya. Serta ingin mengetahui seberapa besar Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Dengan alasan pengambilan



objek penelitian di Kabupaten Situbondo karena dari fenomena yang terjadi, dari keseluruhan jumlah SKPD ditemukan hanya sedikit pegawai pada bagian penatausahaan keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi hal tersebut dapat menyebabkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dan dari temuan BPK bahwa tidak keseluruhan dari SKPD menyampaikan laporan keuangan pemerintah secara tepat waktu, hal ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya kapasitas intelektual sumber daya manusia dan kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sehingga dalam jangka waktu tiga tahun terakhir Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah kapasitas intelektual sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
- b. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
- c. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menguji serta mendapatkan bukti empiris apakah kapasitas intelektual sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

- b. Mengetahui dan menguji serta mendapatkan bukti empiris apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Mengetahui dan menguji serta mendapatkan bukti empiris apakah sistem pengendalian intern pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademi, mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari pengaruh kapasitas intelektual sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan.
- b. Bagi Pemerintah.  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak organisasi yang terkait untuk dapat mengevaluasi dan menggunakan hasil penelitian ini untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya.  
Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan dan referensi bagi kegiatan penelitian selanjutnya.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Laporan Keuangan

Menurut Kieso dkk (2002) Laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar korporasi. Laporan ini melampirkan sejarah perusahaan yang dikuantitatifkan dalam nilai moneter. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Mardiasmo (2002) mengungkapkan bahwa tujuan umum laporan keuangan bagi organisasi pemerintah adalah:

- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- b. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- c. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menyebutkan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebut harus berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

## **2.1.2 Nilai Informasi**

Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat kalau

informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut (Suwardjono, 2005).

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) :

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
  - a) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
  - b) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
  - c) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
  - d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat diandalkan pemakainya sebagai

penyajian yang jujur, dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
  - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
  - c. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan, Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
  4. Dapat dipahami, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

### **2.1.3 Kapasitas Intelektual Sumber Daya Manusia**

Kapasitas yaitu hasil produksi atau volume pemrosesan (*throughput*) atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu (Heizer dan Render, 2006). Berbeda dengan kualitas yang berarti ukuran seberapa mampu suatu barang atau jasa memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan standar tertentu. Standar tersebut mungkin berkaitan dengan waktu, bahan, kinerja, keandalan, atau karakteristik yang dapat dikuantitaskan.

Sumber daya manusia atau SDM yaitu potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang

terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Kapasitas intelektual sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Yosefrenaldi, 2008).

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kapasitas baik, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, mempunyai peran dan tanggung jawab pada sub bagian terkait, sering mengikuti pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan.

#### **2.1.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut Jugiyanto (1995) pemanfaatan adalah perilaku karyawan teknologi dalam tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang dijalankan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan.

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000 dalam Arfianti 2011). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya penggunaan komputer dan *software* secara optimal, aplikasi *software* yang digunakan, proses akuntansi secara komputerisasi, laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi dan perawatan perangkat secara baik. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi.

## 2.1.5. Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Pemerintah yang meliputi prosedur standar operasi, pemisahan wewenang di setiap bagian, dokumen dan catatan yang memadai, pembatasan akses untuk umum dan langkah-langkah yang digunakan untuk mencegah adanya kecurangan.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dari penelitian ini, dapat disebutkan beberapa hasil penelitian terdahulu antara lain:

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
Yose frenaldi (2008)	Pengaruh Kapasitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dg Variabel Intervening SPIP	Variabel Dependen: Kualitas LKPD  Variabel Independen: Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI  Variabel Intervening: SPIP	DPKAD Se-Sumatera Barat.	Kapasitas SDM berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD, Pemanfaatan TI berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD, SPIP berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD.



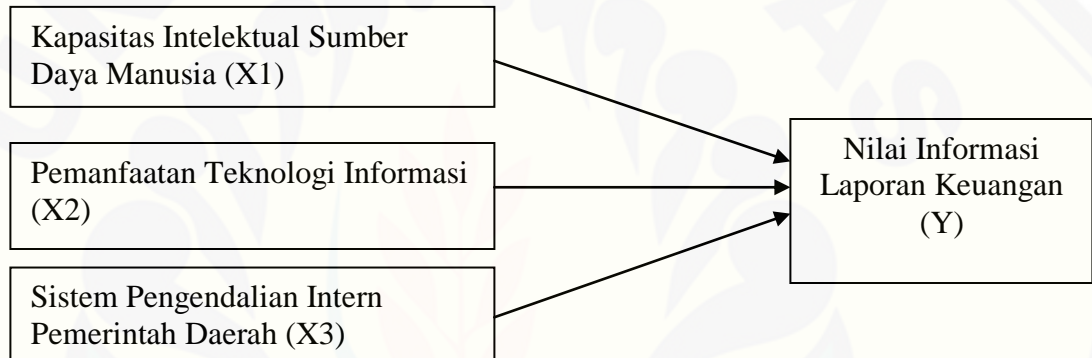
Nama Peneliti	Judul	Variabel	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
Andriani (2010)	Pengaruh Kapasitas intelektual sumber daya manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan).	Variabel Dependen: Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  Variabel Independen: Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI	Bagian akuntansi / penatausahaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan	Kapasitas intelektual sumber daya manusia secara signifikan memiliki pengaruh terhadap validitas laporan keuangan pemerintah daerah dan penggunaan teknologi informasi secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah .
Arfianti (2011)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Batang)	Variabel Dependen: Nilai informasi pelaporan keuangan daerah  Variabel Independen: Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, SPIP, Pengawasan Keuangan Daerah	Kepala dan staf bagian keuangan pada SKPD di Kabupaten Batang.	SPI berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
Ariesta (2013)	Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Variabel Dependenden: Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Variabel Independenden: Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, Pengendalian Intern Akuntansi</p>	Bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Pasaman Barat	<p>pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan. Kualitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan</p>

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Objek Penelitian	Hasil Penelitian terhadap ketepatanwaktuan.
---------------	-------	----------	------------------	---

## 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dalam tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini gambaran kerangka konseptual yang berfungsi sebagai acuan dan cerminan pola pikir yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan perumusan hipotesis. Berikut kerangka konseptual dalam penelitian ini:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## 2.4. Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1. Pengaruh Kapasitas Intelektual Sumber Daya Manusia terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan

Kapasitas intelektual sumber daya manusia adalah kemampuan intelektual sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara

optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Tetapi pada kenyataan yang terjadi pegawai negeri sipil masih minim pemahamannya tentang akuntansi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas. Untuk menghindari kejadian tersebut seharusnya diadakan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan tugas pegawai negeri sipil tersebut.

Menurut Andriyani (2010) kapasitas intelektual sumber daya manusia secara signifikan memiliki pengaruh terhadap validitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasar kajian diatas maka didapat hipotesis:

H<sub>1</sub>: Kapasitas Intelektual Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan.

#### **2.4.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan**

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas,

maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian *hardware* yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak.

Menurut Andriani (2010) teknologi informasi secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Arfianti (2011) teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan tetapi tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Berdasar kajian di atas maka didapat hipotesis:

H<sub>2</sub>: Teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan.

### **2.4.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah adalah:

1. Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah.
2. Keandalan pelaporan keuangan.
3. Pengamanan aset negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada kenyataan di lapangan masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keterandalan. Hasil evaluasi pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa masih terdapat LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar dan memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut Arfianti (2010) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasar kajian di atas didapat hipotesis:

H<sub>3</sub>: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan.

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data pokok yang dikumpulkan melalui survei kuisioner terhadap bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang meliputi dinas, badan, kantor dan kecamatan.

### 3.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 1999). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota instansi/lembaga yang meliputi pegawai kantor, dinas, badan dan kantor kecamatan pada pemerintah Kabupaten Situbondo.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2003). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu metode pengumpulan data dengan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Dengan kriteria yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (Pembantu PPK-SKPD) dan staf pada bagian keuangan pada 15 dinas, 5 badan, 4 kantor dan 17 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Situbondo yang telah menjabat pada bagian tersebut minimal selama setahun terakhir.

### 3.3. Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survey. Metode survey merupakan pengumpulan data primer berdasarkan komunikasi antara peneliti dengan responden. Teknik yang dipilih dari metode survey adalah dengan menggunakan kuisioner. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk menjawab. Kuisisioner tersebut diberikan kepada responden secara langsung oleh peneliti sehingga peneliti dapat memberikan penjelasan singkat dan dapat langsung dikumpulkan setelah kuisisioner selesai dijawab oleh responden. Langkah ini dilakukan peneliti untuk memperkecil kemungkinan kuisisioner tidak dikembalikan (Indriantoro dan Supomo, 1999).

### **3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur *construct* menjadi variabel penelitian yang dapat diuji. Variabel adalah sesuatu yang mempunyai variasi nilai atau memiliki bermacam-macam nilai atau segala sesuatu yang memnjadi pengamatan penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta definisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

#### **3.4.1. Varibel independent (variabel bebas), terdiri dari:**

##### **a) Kapasitas Intelektual Sumber Daya Manusia (X1).**

Kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Laporan akhir studi GTZ & USAID/CLEAN Urban, 2001). Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skor terendah (angka 1) menunjukkan kondisi sangat tidak setuju dan skor tertinggi (angka 5) menunjukkan kondisi sangat setuju. Kapasitas intelektual sumber daya manusia dalam penelitian ini diukur melalui instrumen atau indikator yang diadopsi dari penelitian Yosefrenaldi (2008).

Indikator-indikator tersebut antara lain:

1. Latar belakang pendidikan pada sub bagian keuangan/akuntansi.
2. Peran dan tanggung jawab sub bagian keuangan.
3. Pelatihan keahlian dalam tugas.
4. Sumber daya manusia yang berpengalaman.



b) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2).

Pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya (Fadila, 2013). Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skor terendah (angka 1) menunjukkan kondisi sangat tidak setuju dan skor tertinggi (angka 5) menunjukkan kondisi sangat setuju. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini diukur melalui instrumen atau indikator yang diadopsi dari penelitian Yosefrenaldi (2008).

Indikator-indikator tersebut antara lain:

1. Penggunaan secara optimal dari komputer & perangkat lunak.
2. Aplikasi *software* yang digunakan.
3. Proses akuntansi secara komputerisasi.
4. Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi.
5. Perawatan perangkat yang digunakan.

c) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (X3)

Pengendalian intern akuntansi adalah bagian dari pengendalian intern yang meliputi rencana organisasi, prosedur dan catatan yang dirancang untuk menjaga keterandalan data akuntansi. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skor terendah (angka 1) menunjukkan kondisi sangat tidak setuju dan skor tertinggi (angka 5) menunjukkan kondisi sangat setuju. Sistem pengendalian intern pemerintah dalam penelitian ini diukur melalui instrumen atau indikator yang diadopsi dari penelitian Ariesta (2013).

Indikator-indikator tersebut antara lain:

1. *Standard Operating Procedure* (SOP).
2. Pemisahan wewenang.
3. Dokumen dan catatan yang memadai.
4. Pembatasan akses.
5. Langkah-langkah pencegah kecurangan.

### 3.4.2. Variabel Dependent (Variabel Terikat) yaitu Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)

Nilai informasi laporan keuangan adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya dalam menyajikan data informasi. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skor terendah (angka 1) menunjukkan kondisi sangat tidak setuju dan skor tertinggi (angka 5) menunjukkan kondisi sangat setuju. Nilai informasi dalam penelitian ini diukur melalui instrumen atau indikator yang diadopsi dari penelitian Yosefrenaldi (2008).

Indikator-indikator tersebut antara lain:

1. Relevan : Manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.
2. Andal : Penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas.
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

## 3.5. Metode Analisis Data

### 3.5.1. Pengujian Instrumen

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif, dimana kuisisioner yang telah terkumpul diolah dalam bentuk tabulasi dengan memberikan bobot jawaban pada masing-masing pernyataan. Dari tabulasi data tersebut dihasilkan keluaran-keluaran berupa angka yang selanjutnya dianalisis melalui program SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Setelah kuisisioner terkumpul untuk melakukan analisis data perlu dilakukan uji validitas dan uji reabilitas. Kedua pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan sesuai dengan yang diukur dan juga konsistensi dengan data.

- a) Uji Validitas.

Uji validitas merupakan sejauh mana alat ukur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (Indriantoro dan Supomo, 1999). Uji validitas dilakukan dengan korelasi skor individu yang diperoleh masing-masing item/pertanyaan dengan skor total dari masing-masing item dengan menggunakan teknik korelasi person. Kriteria yang ditetapkan untuk mengukur valid tidaknya suatu data adalah jika mempunyai nilai koefisien ( $r_{hitung}$ ) > ( $r_{tabel}$ ), selain itu validitas dapat dilihat dari nilai signifikan jika nilai signifikan 5% atau 0,05 maka item itu dapat dikatakan valid.

## b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji kebebasan pengukuran dari kesalahan random sehingga menghasilkan bentuk yang konstan. Suatu alat ukur dinyatakan konsisten dan dapat diandalkan jika alat ukur tersebut dapat memberikan hasil yang sama bila digunakan untuk mengukur ulang objek yang sama. Tujuan dilakukan reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi suatu alat ukur (kuisisioner). Suatu instrument dikatakan reliable jika mempunyai nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,6 (Nurllaly, 1978 dalam Oktavian, 2013). Teknik *cronbach alpha* menunjukkan indeks konsistensi internal yang akurat, cepat, dan ekonomis.

## 3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Agar penggunaan analisis regresi ini tidak bias atau tidak terjadi pelanggaran terhadap asumsi tersebut, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik, yang terdiri dari:

### a) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas digunakan untuk menguji kenormalan distribusi data untuk menghindari bias dan mengetahui apakah data yang dijadikan sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian

ini dilakukan dengan uji *Komolgorov-smirnov*. Dengan kriteria pengujian yaitu jika angka signifikan lebih dari 0,05 maka data berdistribusi secara normal.

b) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah untuk melihat ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear ganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Uji Multikolear dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas/independen dalam suatu model tidak saling berkorelasi satu dengan lainnya. Pengujian yang baik merupakan pengujian yang mana di dalamnya tidak terdapat suatu multikolinearitas. Ada tidaknya multikolinearitas dapat diketahui apabila variabel memiliki *Varian Inflation Factor* artinya dikatakan multikol apabila nilai VIF disekitar angka 10. Jika  $VIF < 10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas. Semakin tinggi VIF, maka semakin besar peluang untuk terjadinya multikolinearitas antar variabel independen atau variabel bebas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menunjukkan varian dan residual yang tidak sama dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel dari setiap kesalahan pengganggu untuk variabel-variabel bebas yang diketahui tidak mempunyai varian yang sama untuk semua pengamatan. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan grafik *catterplot*. Kriteria terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu apabila ada pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar, dan menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila ada pola yang telah, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.5.3. Uji Hipotesis

## a) Analisis Regresi Berganda

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dimana regresi berganda ini digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi berganda yang digunakan dapat dirumuskan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y	= Nilai informasi laporan keuangan
$\alpha$	= Konstanta
X1	= Kapasitas SDM
X2	= Pemanfaatan teknologi informasi
X3	= Sistem pengendalian intern pemerintah
e	= Standar error

## b) Uji F

Uji F adalah uji kelayakan model (*goodness of fit*) yang harus dilakukan dalam analisis regresi linear. Jika uji F tidak signifikan, maka tidak disarankan untuk melakukan uji t atau uji parsial. Uji F dilakukan dengan menggunakan tabel ANOVA yang bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05.

Ketentuan yang digunakan adalah (berdasarkan probabilitas):

1. Jika probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  tidak berhasil ditolak, yang berarti bahwa model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.
2. Jika probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  berhasil ditolak, yang berarti bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Atau dapat menggunakan perbandingan antara F Hitung dan F Tabel dengan criteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang berarti bahwa model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian.

2. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, yang berarti bahwa model regresi tidak layak untuk digunakan dalam penelitian.

## c) Uji t

Uji t yaitu menguji apakah variabel independen (X) secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah:

1. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis juga dapat menggunakan perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ . Nilai  $t_{tabel}$  dapat dilihat dengan menggunakan  $t_{tabel}$ . Dasar pengambilan keputusan adalah:

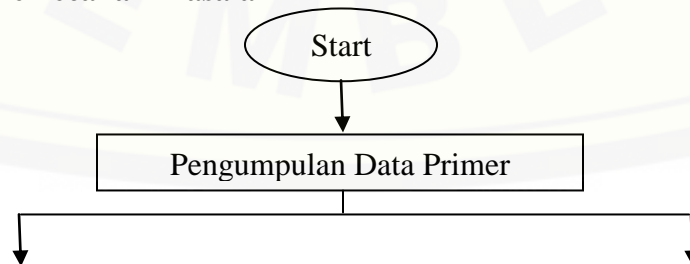
1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, yang berarti bahwa variabel independennya secara parsial mampu menjelaskan variasi pada variabel dependennya.
2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, yang berarti bahwa variabel independennya secara parsial tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel dependennya.

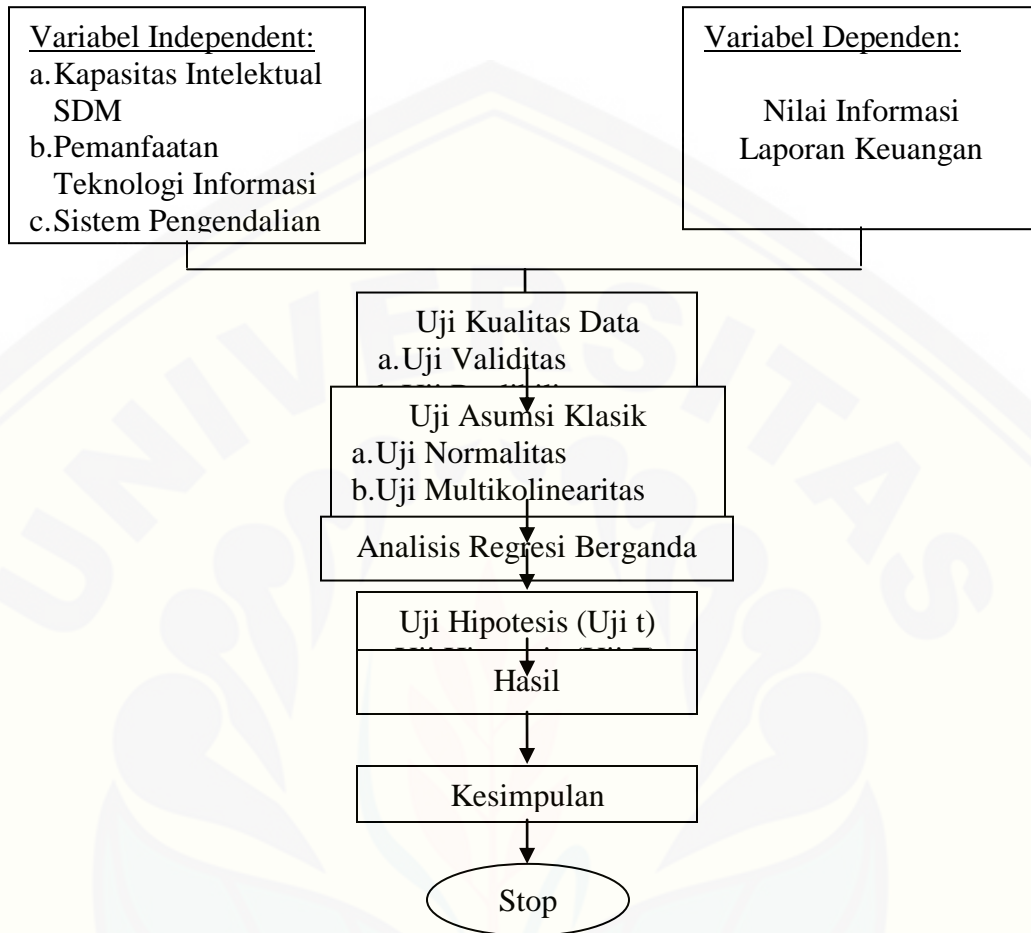
## 3.5.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas Y (variabel yang dipengaruhi atau dependen) yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X (variabel yang mempengaruhi atau independen) (Supranto, 2001). Koefisien determinasi digunakan untuk menggambarkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi yang terjadi dalam

variabel dependen. Koefisien determinasi dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien determinasi ini berkisar  $0 < R^2 < 1$ , apabila nilai  $R^2$  kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, dan sebaliknya apabila nilai  $R^2$  besar berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen besar.

### 3.6. Kerangka Pemecahan Masalah





## BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

#### 4.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Situbondo



Visi dan misi yang dimiliki oleh pemerintahan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

- a. Visi: Terwujudnya masyarakat Situbondo yang beriman, sejahtera, dan berkeadilan.
- b. Misi:
  1. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan melalui peningkatan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari serta member perhatian pada lembaga untuk kelancaran peran dan tanggung jawab.
  2. Meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
  3. Memperdayakan dan meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat.
  4. Meningkatkan kualitas dan netralitas pengabdian pengelola pemerintahan demi terwujudnya profesionalitas kinerja pelayanan.
  5. Meningkatkan kualitas demokrasi supremasi hukum dan HAM melalui peningkatan kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat.

Tujuan dari pemerintahan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, budu pekerti, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai masyarakat Situbondo yang bermartabat.
- b. Meningkatkan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk menikmati pendidikan secara luas dan merata, menjangkau seluruh lapisan dan wilayah, di berbagai strata dan jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan dengan meningkatkan cakupan layanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan dengan meningkatkan cakupan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting perilaku hidup.

- c. Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, tumbuhnya investasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi serta berkembangnya usaha ekonomi produktif di masyarakat, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas dan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah yang didasari kecintaan kepada rakyat dalam memberikan layanan sehingga terciptanya keterbukaan, pelayanan yang harmonis, adil, dan memiliki kepastian hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- e. Meningkatkan upaya penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan HAM yang diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap HAM, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

#### 4.1.2 Gambaran Umum Responden Penelitian

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi pemerintah daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan tugasnya, SKPD dipimpin oleh seorang kepala SKPD.

Responden dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (Pembantu PPK-SKPD) dan staff bagian keuangan di Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini melibatkan SKPD teknis daerah yang terdiri dari 42 SKPD. Berikut ini daftar SKPD Kabupaten Situbondo yang menjadi objek penelitian terdapat pada Tabel 4.1 yaitu

Tabel 4.1 Rincian Daftar SKPD

No.	Nama Dinas, Badan, dan Kantor di kabupaten Situbondo
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pertanian

- 
- 4 Dinas Peternakan
  - 5 Dinas Sosial
  - 6 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
  - 7 Dinas Bina Marga dan Pengairan
  - 8 Dinas Cipta Karya
  - 9 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - 10 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  - 11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - 12 Dinas Kelautan dan Perikanan
  - 13 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
  - 14 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  - 15 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 16 Badan Kepegawaian Daerah
  - 17 Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
  - 18 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
  - 19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - 20 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
  - 21 Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
  - 22 Kantor Lingkungan Hidup
  - 23 Kantor Keluarga Berencana
  - 24 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
  - 25 Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo
  - 26 Kecamatan Arjasa
  - 27 Kecamatan Asembagus
  - 28 Kecamatan Banyuglugur
  - 29 Kecamatan Banyuputih
  - 30 Kecamatan Besuki
  - 31 Kecamatan Bungatan
  - 32 Kecamatan Jangkar
  - 33 Kecamatan Jatibanteng
  - 34 Kecamatan Kapongan
  - 35 Kecamatan Kendit
  - 36 Kecamatan Mangaran
  - 37 Kecamatan Mlandingan
  - 38 Kecamatan Panarukan
  - 39 Kecamatan Panji
  - 40 Kecamatan Situbondo
  - 41 Kecamatan Suboh
  - 42 Kecamatan Sumbermalang

---

Sumber: [www.situbondo.go.id](http://www.situbondo.go.id) (2015)

Peneliti telah menyebarkan kuesioner sebanyak 126 kuesioner pada seluruh pejabat penatausahaan keuangan SKPD, pembantu pejabat penatausahaan keuangan SKPD dan staff keuangan di Dinas, Badan, Kantor Kabupaten Situbondo. Dari jumlah kuesioner yang disebar, jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 98 kuesioner dengan tingkat pengembalian 77,78%.

Tabel 4.2 Deskripsi Proses Pengumpulan Data Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah kuesioner yang disebar	126
2	Jumlah kuesioner yang kembali	98
3	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	28
4	Tingkat prosentase pengembalian kuesioner	77,78%
5	Jumlah kuesioner yang diolah	98

Sumber: data primer diolah. 2015.

Peneliti menyebarkan 126 kuesioner yang disebar dan hanya ada 98 kuesioner yang kembali. Kuesioner tidak kembali disebabkan karena beberapa responden merasa bahwa apa yang akan dijawab sama dengan rekan kerjanya sehingga mereka tidak mengisinya. Berdasarkan hasil perhitungan akhir, terdapat 98 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Berdasarkan jumlah sampel, diperoleh data-data terkait dengan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan, lama menduduki jabatan dan nama instansi.

Tabel 4.3 Gambaran Umum Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	59	60,2
2	Perempuan	39	39,8
	Jumlah	98	100

Sumber: Lampiran 2. Data diolah. 2015.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari jumlah responden sebesar 98 orang. Secara umum mayoritas responden adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 59 responden atau 60,2%. Sedangkan responden perempuan sebanyak 39 responden atau 39,8%.

Tabel 4.4 Gambaran Umum Identitas Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	28 tahun – 32 tahun	22	22,4
2	32 tahun – 37 tahun	33	33,7
3	38 tahun – 42 tahun	27	27,6
4	> 42 tahun	16	16,3
	Jumlah	98	100

Sumber: Lampiran 2, Data diolah. 2015.

Usia responden mayoritas adalah 32 tahun hingga 37 tahun sebanyak 33 orang (33,7%). Ada 22 orang (22,4%) berusia dari 28 tahun hingga 32 tahun, sebanyak 27 orang (27,6%) berusia 38 hingga 42 tahun dan ada 16 orang (16,3%) berusia lebih dari 42 tahun.

Tabel 4.5 Gambaran Umum Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	SMA	0	0
2	D3	9	9,2
3	S1	68	69,4
4	S2	21	21,4
	Jumlah	98	100

Sumber: Lampiran 2. Data diolah. 2015.

Berdasarkan Tabel 4.5, pendidikan terakhir responden mayoritas adalah S1 yaitu sebanyak 68 orang (69,4%), sebanyak 9 orang (9,2%) yaitu berpendidikan terakhir D3 dan sebanyak 21 orang (21,4%) berpendidikan terakhir S2.

Tabel 4.6 Gambaran Umum Identitas Responden Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)	42	42,8
2	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (Pembantu PPK-SKPD)	42	42,8
3	Staff Keuangan	14	14,2
	Jumlah	98	100

Sumber: Lampiran 2. Data diolah. 2015.

Jumlah responden Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (Pembantu PPK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) sebanyak 42 orang (42,8%) sedangkan Staff keuangan ada 14 orang (14,2%)

Tabel 4.7 Gambaran Umum Identitas Responden Berdasarkan Lama Menduduki Jabatan

No	Lama Menduduki Jabatan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
	1 - 2 tahun	25	25,5
	3 - 4 tahun	57	58,1
	5 tahun	16	16,3

Sumber: Lampiran 2. Data diolah. 2015.

Berdasarkan Tabel 4.7, mayoritas responden telah menduduki jabatan selama 3 hingga 4 tahun yaitu sebanyak 57 orang (58,1%). Sebanyak 25 orang (25,5%) telah menduduki jabatan selama 1 hingga 2 tahun dan ada 16 orang (16,3%) menduduki jabatan selama 5 tahun.

#### 4.1.3 Hasil Pengujian Kualitas Data

##### a. Hasil Pengujian Validitas

Uji validitas dilakukan dengan korelasi skor individu yang diperoleh masing-masing item/pertanyaan dengan skor total dari masing-masing item dengan menggunakan teknik korelasi person. Kriteria yang ditetapkan untuk mengukur valid tidaknya suatu data adalah jika mempunyai nilai koefisien ( $r_{hitung}$ ) > ( $r_{tabel}$ ), dan nilai signifikan < 5% atau 0,05 maka variabel dapat dikatakan valid.

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Pearson	Sig.	Keterangan
Kapabilitas Intelektual Sumber Daya Manusia			
(X <sub>1</sub> )			
X <sub>1.1</sub>	0,444	0,000	Valid
X <sub>1.2</sub>	0,556	0,000	Valid
X <sub>1.3</sub>	0,707	0,000	Valid
X <sub>1.4</sub>	0,748	0,000	Valid
X <sub>1.5</sub>	0,722	0,000	Valid
X <sub>1.6</sub>	0,627	0,000	Valid
X <sub>1.7</sub>	0,473	0,000	Valid

X <sub>1.8</sub>	0,483	0,000	Valid
X <sub>1.9</sub>	0,574	0,000	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X <sub>2</sub> )			
X <sub>2.1</sub>	0,707	0,000	Valid
X <sub>2.2</sub>	0,776	0,000	Valid
X <sub>2.3</sub>	0,796	0,000	Valid
X <sub>2.4</sub>	0,752	0,000	Valid
X <sub>2.5</sub>	0,638	0,000	Valid
X <sub>2.6</sub>	0,723	0,000	Valid
X <sub>2.7</sub>	0,668	0,000	Valid
X <sub>2.8</sub>	0,737	0,000	Valid
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X <sub>3</sub> )			
X <sub>3.1</sub>	0,726	0,029	Valid
X <sub>3.2</sub>	0,618	0,075	Valid
X <sub>3.3</sub>	0,512	0,001	Valid
X <sub>3.4</sub>	0,492	0,000	Valid
X <sub>3.5</sub>	0,576	0,000	Valid
X <sub>3.6</sub>	0,626	0,000	Valid
X <sub>3.7</sub>	0,611	0,000	Valid
X <sub>3.8</sub>	0,669	0,000	Valid
Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)			
Y <sub>.1</sub>	0,452	0,000	Valid
Y <sub>.2</sub>	0,508	0,000	Valid
Y <sub>.3</sub>	0,522	0,000	Valid
Y <sub>.4</sub>	0,609	0,000	Valid
Y <sub>.5</sub>	0,640	0,000	Valid
Y <sub>.6</sub>	0,560	0,000	Valid
Y <sub>.7</sub>	0,548	0,000	Valid
Y <sub>.8</sub>	0,602	0,000	Valid
Y <sub>.9</sub>	0,593	0,000	Valid
Y <sub>.10</sub>	0,433	0,000	Valid

Sumber: Lampiran 4. Data diolah. 2015.

Tabel 4.8 menunjukkan hasil bahwa semua nilai signifikansi korelasi antara skor butir pernyataan terhadap total skor butir pernyataan memiliki nilai  $r > 0,330$  dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa setiap item pernyataan dalam kuisioner memiliki validitas.

**b. Hasil Pengujian Reliabilitas**

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji kebebasan pengukuran dari kesalahan random sehingga menghasilkan bentuk yang konstan. Suatu alat ukur dinyatakan konsisten dan dapat di andalkan jika alat ukur tersebut dapat memberikan hasil yang sama bila digunakan untuk mengukur ulang objek yang sama. Tujuan dilakukan reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi suatu alat ukur (kuisisioner). Suatu instrument dikatakan *reliable* jika mempunyai nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,6 (Nurllaly, 1978 dalam Oktavian, 2013).

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen

No	Variabel	Nilai <i>Cronbach</i> <i>Aspha</i> ( $\alpha$ )	Keterangan
1	Kapasitas Intelektual Sumber Daya Manusia	0,771	Reliabel
2	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,777	Reliabel
3	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,705	Reliabel
4	Nilai Informasi Laporan Keuangan	0,728	Reliabel

Sumber: Lampiran 5. Data diolah. 2015.

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil perbandingan antara nilai *Cronbach Aspha* ( $\alpha$ ) dengan  $\alpha$  ketetapan yang merupakan nilai kritis reliabilitas semuanya telah memenuhi kriteria yakni nilai  $\alpha$  lebih besar dari 0,60. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa semua item pernyataan dalam kuesioner reliabel.

**4.1.4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik**

Untuk mendapatkan nilai yang *Best Linier Unbias Estimator* (BLUE) dari satu persamaan regresi linier berganda perlu dilakukan pengujian asumsi klasik, seperti uji normalitas data, multikolinearitas, heteroskedastisitas.



**a. Hasil Pengujian Normalitas Data**

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas digunakan untuk menguji kenormalan distribusi data untuk menghindari bias dan mengetahui apakah data yang dijadikan sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *Komolgorov-smirnov*. Dengan kriteria pengujian yaitu jika angka signifikan lebih dari 0,05 maka data berdistribusi secara normal.

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Normalitas

No	Variabel	Sig	Keterangan
1	Kapasitas Intelektual Sumber Daya Manusia	0,317	Berdistribusi Normal
2	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,328	Berdistribusi Normal
3	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,365	Berdistribusi Normal
4	Nilai Informasi Laporan Keuangan	0,337	Berdistribusi Normal

Sumber: Lampiran 6. Data diolah. 2015.

Uji normalitas data yang telah dilakukan menjelaskan bahwa variabel kapasitas intelektual sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah daerah dan nilai informasi laporan keuangan memiliki angka signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas.

**b. Hasil Pengujian Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Hasil uji multikolinieritas adalah dengan memperhatikan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* masing-masing variabel, di mana apabila nilai  $VIF < 10$ , maka bebas multikolinieritas seperti yang terdapat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Multikolinieritas

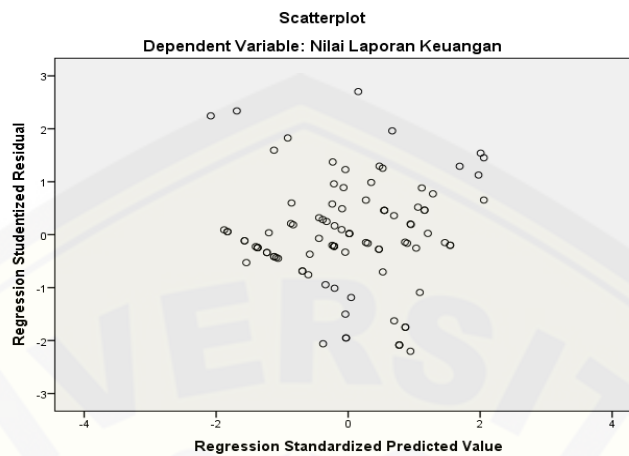
Variabel	VIF	Keputusan
Kapasitas Intelektual Sumber Daya Manusia	1,097	Bebas Multikolinieritas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,198	Bebas Multikolinieritas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1,268	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Lampiran 6. Data diolah. 2015.

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, terlihat bahwa nilai VIF untuk variabel kapasitas intelektual sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah daerah  $< 10$ , hal ini menunjukkan tidak terjadinya gejala multikolinieritas dalam model regresi.

### c. Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas menunjukkan varian dan residual yang tidak sama dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel dari setiap kesalahan pengganggu untuk variabel-variabel bebas yang diketahui tidak mempunyai varian yang sama untuk semua pengamatan. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan grafik *catterplot*. Kriteria terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu apabila ada pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar, dan menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila ada pola yang telah, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.1 Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Sumber: Lampiran 6. Data diolah. 2015.

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa dapat dilihat tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.1.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi linier berganda dilakukan untuk menganalisis pengaruh kapasitas intelektual sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. Sesuai hasil analisis regresi dengan menggunakan SPSS Versi 21 dapat dilihat pada Tabel 4.12

Tabel 4.12 Hasil Ringkasan Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	2,668			
Kapasitas intelektual sumber daya manusia	0,223	0,090	2,476	0,015
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,240	0,094	2,541	0,013
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,329	0,097	3,393	0,001

Sumber: Lampiran 7. Data diolah. 2015.

Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah :

$$Y = 2,668 + 0,223X_1 + 0,240X_2 + 0,329 X_3$$

Analisis dari persamaan tersebut adalah :

- 1) Koefisien regresi kapasitas intelektual sumber daya manusia adalah positif, hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara variabel kapasitas intelektual sumber daya manusia dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya apabila ada peningkatan kapasitas intelektual sumber daya manusia, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah tetap maka nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan. Demikian pula sebaliknya, apabila ada penurunan kapasitas intelektual sumber daya manusia, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah tetap maka nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah mengalami penurunan.
- 2) Koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi adalah positif, hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan searah antara variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya apabila ada peningkatan pemanfaatan teknologi informasi tetapi kapasitas intelektual sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern pemerintah tetap maka nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat. Demikian pula sebaliknya, apabila ada penurunan pemanfaatan teknologi informasi tetapi kapasitas intelektual sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern pemerintah tetap maka nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah juga akan menurun.
- 3) Koefisien regresi sistem pengendalian intern pemerintah sebesar positif, hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan searah antara variabel sistem pengendalian intern pemerintah dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya apabila ada peningkatan terhadap Sistem pengendalian intern pemerintah tetapi kapasitas intelektual sumber daya manusia,

pemanfaatan teknologi informasi, tetap maka nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat. Demikian pula sebaliknya, apabila ada penurunan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah tetapi kapasitas intelektual sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, tetap maka nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah juga akan menurun.

#### 4.1.6 Uji f

Uji F adalah uji kelayakan model (*goodness of fit*) yang harus dilakukan dalam analisis regresi linear. Jika uji F tidak signifikan, maka tidak disarankan untuk melakukan uji t atau uji parsial. Uji F dilakukan dengan menggunakan tabel ANOVA yang bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, sehingga nilai koefisien regresi secara bersama-sama dapat diketahui.

Tabel 4.13 Hasil Uji f

Nilai f hitung	Nilai f tabel	Sig	Keputusan
13,616	2,78	0,000	Signifikan

Sumber: Lampiran 7. Data diolah. 2015.

Berdasarkan uji ANOVA atau  $F_{test}$ , didapat nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$  yaitu  $13,616 > 2,78$  dan probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian.

#### 4.1.7 Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian nilai koefisien regresi masing-masing variabel independen dapat dilakukan dengan membandingkan antara statistik hitung dan statistik tabel.

- 1) Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, jadi variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh nyata atau signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, jadi variabel independen secara parsial memiliki pengaruh nyata atau signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.14 Rekapitulasi Hasil Uji t

Variabel	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Sig.	Keterangan
Kapasitas intelektual sumber daya manusia	2,476	1,672	0,015	H <sub>1</sub> diterima
Pemanfaatan teknologi informasi	2,541	1,672	0,013	H <sub>2</sub> diterima
Sistem pengendalian intern pemerintah	3,393	1,672	0,001	H <sub>3</sub> diterima

Sumber: Lampiran 7. Data diolah. 2015.

Berdasarkan Tabel 4.14 maka dapat diketahui bahwa semua variabel seperti kapasitas intelektual sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh nyata dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan. Masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai  $t_{hitung}$  dari kapasitas intelektual sumber daya manusia lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,476 > 1,672$ ), dan nilai signifikansi hasil penelitian adalah lebih kecil dari 5%, yaitu 0,015, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kapasitas intelektual sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan, diterima.
- 2) Nilai  $t_{hitung}$  dari pemanfaatan teknologi informasi lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,541 > 1,672$ ), dan nilai signifikansi hasil penelitian adalah lebih kecil dari 5%, yaitu 0,013, maka hipotesis ke dua yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan, diterima.
- 3) Nilai  $t_{hitung}$  dari sistem pengendalian intern pemerintah lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3,393 > 1,672$ ), dan nilai signifikansi hasil penelitian adalah lebih kecil dari 5%, yaitu 0,001, maka hipotesis ke tiga yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan, diterima.

## 4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan diuraikan di atas, diketahui bahwa variabel-variabel bebas yaitu kapasitas intelektual sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, berpengaruh nyata dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan.

#### **4.2.1 Pengaruh Kapasitas intelektual sumber daya manusia Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo**

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh bahwa kapasitas intelektual sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan, ini dibuktikan dengan perhitungan regresi dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kapasitas intelektual sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan, diterima. Berpengaruhnya kapasitas intelektual sumber daya manusia terhadap nilai informasi laporan keuangan mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemampuan SDM baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, maka nilai informasi laporan keuangan semakin baik.

Menurut Yosefrenaldi (2008), kapasitas intelektual sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kapasitas baik, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (Pembantu PPK-SKPD), memiliki latar belakang pendidikan pada sub bagian keuangan/akuntansi, memiliki peran dan tanggung jawab sub bagian keuangan, melakukan pelatihan keahlian dalam tugas dan memiliki kapasitas sehingga mampu meningkatkan nilai informasi laporan keuangan yaitu dimana informasi laporan keuangan tersebut relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2008) yang menemukan bahwa Kapasitas SDM berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD. Selain itu penelitian ini juga mendukung penelitian Andriani (2010), yang menemukan bahwa kapasitas intelektual sumber daya manusia secara signifikan memiliki pengaruh terhadap validitas laporan keuangan pemerintah daerah dan penggunaan teknologi informasi secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah. Ariesta (2013) juga menemukan bahwa kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan.

#### **4.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo**

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan, ini dibuktikan dengan perhitungan regresi dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian hipotesis ke dua yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan, diterima. Berpengaruhnya pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan mengindikasikan bahwa semakin baik manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya, maka nilai informasi laporan keuangan semakin baik.



Menurut Jugiyanto (1995) pemanfaatan adalah perilaku karyawan teknologi dalam tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang dijalankan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di SKPD Situbondo, sub bagian keuangan memiliki komputer dengan jumlah yang cukup untuk melaksanakan tugas, jaringan internet telah terpasang di unit kerja telah digunakan semaksimal mungkin, jaringan komputer telah dimanfaatkan di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan, pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang ada, proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi, laporan akuntansi dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi, adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur dan peralatan yang rusak/ usang di data tepat waktu.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2008) yang menemukan bahwa Pemanfaatan TI berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKPD. Selain itu penelitian ini juga mendukung penelitian Andriani (2010), yang menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi secara signifikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah. Ariesta (2013) juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan.

#### **4.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo**

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan, ini dibuktikan dengan perhitungan regresi dengan tingkat signifikansi 0,040. Dengan demikian hipotesis ke tiga yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan, diterima. Berpengaruhnya sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan mengindikasikan bahwa semakin baik pengendalian intern yang meliputi rencana organisasi, prosedur dan catatan yang dirancang untuk menjaga keterandalan data akuntansi, maka nilai informasi laporan keuangan semakin baik.

Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada SKPD, sub bagian keuangan telah menyelenggarakan sistem akuntansi yang meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi asset dan prosedur akuntansi selain kas. Selain itu, SKPD Situbondo memiliki pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD, daftar rekening (*chart of account*) pemerintah daerah tersedia dan digunakan, setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah, setiap transaksi dicatat dalam buku catatan akuntansi, catatan akuntansi dijaga untuk tetap *up-to-date*, transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang dan laporan-laporan keuangan direview dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala sub bagian keuangan sebelum didistribusikan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Arfianti (2011), yang menemukan bahwa SPI berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ariesta (2013) yang menemukan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan.

Dengan memperhatikan dan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai diharapkan SKPD Situbondo khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu.

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas intelektual sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah, yang ditinjau dengan menggunakan variabel kapasitas intelektual sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah. Setelah dilakukan analisis data, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Hasil penelitian menyatakan bahwa kapasitas intelektual sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi kapasitas intelektual sumber daya manusia yang ada pada bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berpengaruhnya pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan mengindikasikan bahwa semakin baik manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya, maka nilai informasi laporan keuangan semakin baik.
- c. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berpengaruhnya sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan mengindikasikan bahwa semakin baik pengendalian intern yang meliputi rencana organisasi, prosedur dan catatan yang dirancang untuk menjaga keterandalan data akuntansi, maka nilai informasi laporan keuangan semakin baik.

## 5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat kelemahan atau keterbatasan, yaitu

- a. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada.
- b. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden
- c. Responden penelitian terbatas pada 3 bagian yaitu pejabat, pembantu dan staff keuangan, karena ketiga pihak tersebut yang berurusan langsung dengan Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran, antara lain:

- a. Peneliti selanjutnya dapat melengkapi metode survey dengan wawancara untuk meningkatkan sikap keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan yang ada. Dan mengurangi subjektivitas dari responden yang mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.
- b. Mengurangi subjektivitas dari responden yang mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden
- c. Peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel tidak hanya pada bagian keuangan saja tetapi pada semua departemen.
- d. Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah SKPD Kabupaten Situbondo, karena nilai koefisien adalah positif, diharapkan agar bisa meningkatkan lagi atau mempertahankan kapasitas intelektual sumber daya manusia yang berkualitas, memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern secara efektif agar opini BPK untuk Kabupaten Situbondo bisa menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. *Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 05 No. 02. Hal.18-30.
- Andriani, Wiwik. 2010. *Pengaruh Kapasitas intelektual sumber daya manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan)*. Jurnal Akuntansi, Politeknik Negeri Padang.
- Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Batang)*. Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Ariesta, Fadila. 2013. *Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Padang.
- Governmental Accounting Standards Board (GASB). 1999. *Concepts Statement No.1: Objectives Of Financial Reporting In Governmental Accounting Standards Board Series Statement No. 34: Basic Financial Statement And Management Discussion and Analysis For State and Local Government*. Norwalk
- Hevesi, G. Alan. 2005. *Standards for Internal Control in New York State Government*. [www. Osc. State. Ny.us](http://www.Osc.State.Ny.us).
- Indriantoro, Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kieso, Donal E., dkk. 2002. *Intermediate Accounting*. (Diterjemahkan Oleh: Gina Gania dan Ichsan Setiyo Budi). Jakarta: Erlangga.
- M. Nazier, Daeng. 2009. *Kesiapan Sumber Daya Manusia Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara Yang Akuntabel Dan Transparan*. Kaditama Revbang, BPK-RI.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No.1, Hal 1-17.

----- . 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Nugraheni, Purwaniati. 2008. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Ekonomi Bisnis, Universitas Gunadarma.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.

Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. BPFE UGM, Yogyakarta.

Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban. Januari 2001. *Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintahan Daerah-Suatu Kerangka Kerja bagi Pemerintah dan Dukungan Donor. Laporan Akhir: Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan DPRD*. [www.gtzsfdm. Or.id](http://www.gtzsfdm.or.id).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Yosefrinaldi.2008. *Pengaruh Kapasitas intelektual sumber daya manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Padang.

<http://bpk.go.id> (akses 27 Januari 2015)

[http://www. Situbondokab.go.id/](http://www.Situbondokab.go.id/) (akses 27 Januari 2015)

<http://www. Kabarsitubondo.info/> (akses 7 Pebruari 2015)

**LAMPIRAN 1. KUESIONER**

**KUESIONER PENELITIAN  
PENGARUH KAPASITAS INTELEKTUAL SUMBER DAYA MANUSIA,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
SITUBONDO**

Responden yang terhormat,

Memohon kesediaan anda untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Peneliti berharap anda menjawab dengan leluasa, sesuai dengan apa yang anda lakukan. Anda diharapkan menjawab dengan jujur dan terbuka.

Data kuesioner ini peneliti perlukan untuk menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan program studi S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember Jurusan Akuntansi. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner dengan baik, benar, dan jujur. Sesuai dengan kode etik penelitian, peneliti menjamin kerahasiaan semua data. Kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner ini adalah bantuan yang tak ternilai bagi saya. Demi keberhasilan penelitian ini, kami mohon kerja samanya.

Atas kesediaan bapak/Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat Saya,

Firna Dwi Prestisia  
NIM. 100810301095



**IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama Responden : .....
- (Boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin : ( ) Laki-laki  
( ) Perempuan
3. Usia : ..... Tahun
4. Pendidikan Terakhir : ( ) SMA  
( ) D3  
( ) S1  
( ) S2
5. Jabatan : .....
6. Lama Menduduki Jabatan : ..... Tahun

**PETUNJUK PENGISIAN**

Peneliti mengharapkan Bapak/Ibu menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kondisi tempat Bapak/Ibu bekerja dengan memberi tanda *check list* (√) pada tabel yang sudah tersedia dengan memilih:

- |           |                        |            |                              |
|-----------|------------------------|------------|------------------------------|
| <b>SS</b> | <b>: Sangat Setuju</b> | <b>TS</b>  | <b>: Tidak Setuju</b>        |
| <b>S</b>  | <b>: Setuju</b>        | <b>STS</b> | <b>: Sangat Tidak Setuju</b> |
| <b>RR</b> | <b>: Ragu-ragu</b>     |            |                              |

**1. KAPASITAS INTELEKTUAL SUMBER DAYA MANUSIA**

No.	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Minimal staff sub bagian keuangan merupakan lulusan D3 Akuntansi.					
2.	Pegawai yang ahli dibidangnya ditempatkan pada bagian yang sesuai dengan keahlian.					
3.	Pegawai yang memiliki kemampuan dibidangnya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik.					
4.	Metode pelatihan dapat menunjang kapasitas staf bagian keuangan.					
5.	Materi pelatihan yang diberikan mudah dipahami oleh pegawai.					
6.	Materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan staf bagian keuangan.					
7.	Pengalaman dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi pekerjaan.					
8.	Pegawai yang mempunyai prestasi kerja sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk ditempatkan pada bagian lain yang sesuai.					
9.	Pengalaman yang lama dalam suatu bidang dapat mengurangi kesalahan.					

**2. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI**

No.	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Sub bagian keuangan memiliki komputer dengan jumlah yang cukup untuk melaksanakan tugas.					
2.	Jaringan internet telah terpasang di unit kerja secara <i>Local Area Network</i> atau <i>Wide Area Network</i> .					
3.	Jaringan komputer telah dimanfaatkan di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman					

	informasi yang dibutuhkan.					
4.	Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang ada.					
5.	Proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi.					
6.	Laporan akuntansi dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.					
7.	Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.					
8.	Peralatan yang rusak/ usang di data tepat waktu.					

### 3. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

No.	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Sub bagian keuangan menyelenggarakan sistem akuntansi meliputi:					
	Prosedur akuntansi penerimaan kas					
	Prosedur akuntansi pengeluaran kas					
	Prosedur akuntansi asset					
	Prosedur akuntansi selain kas					
2.	Ada pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD					
3.	Daftar rekening ( <i>chart of account</i> ) pemerintah daerah tersedia dan digunakan.					
4.	Setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.					
5.	Setiap transaksi dicatat dalam buku catatan akuntansi.					
6.	Catatan akuntansi dijaga untuk tetap <i>up-to-date</i> .					
7.	Transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang.					
8.	Laporan-laporan keuangan direview dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala sub bagian keuangan sebelum didistribusikan.					

**4. NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN**

No.	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Laporan keuangan yang dikonsolidasikan sub bagian keuangan dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.					
2.	Laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya					
3.	Sub bagian keuangan menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu.					
4.	Sub bagian keuangan mengkonsolidasi laporan keuangan secara lengkap.					
5.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan konsolidasi telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.					
6.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan konsolidasi bebas dari kesalahan yang bersifat material					
7.	Informasi diarahkan untuk kebutuhan umum bukan untuk kebutuhan pihak tertentu.					
8.	Apabila informasi yang dilakukan pengujian lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.					
9.	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
10.	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan konsolidasi memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah.					

**LAMPIRAN 2. REKAPITULASI DATA RESPONDEN**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Usia</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Lama Jabatan</b>
1	Laki-laki	32	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
2	Perempuan	29	D3	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
3	Laki-laki	32	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
4	Perempuan	35	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
5	Laki-laki	32	D3	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
6	Laki-laki	31	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
7	Laki-laki	32	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
8	Perempuan	36	D3	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
9	Perempuan	35	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
10	Laki-laki	32	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
11	Perempuan	36	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
12	Perempuan	35	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	5
13	Laki-laki	31	D3	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
14	Perempuan	36	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	5
15	Laki-laki	32	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
16	Perempuan	30	D3	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
17	Laki-laki	31	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	1
18	Laki-laki	32	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	5
19	Perempuan	36	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
20	Laki-laki	32	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4

No	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Lama Jabatan
21	Laki-laki	37	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
22	Perempuan	42	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	5
23	Perempuan	41	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
24	Laki-laki	36	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
25	Perempuan	36	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
26	Perempuan	41	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	5
27	Laki-laki	37	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
28	Perempuan	40	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
29	Laki-laki	36	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	5
30	Laki-laki	40	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
31	Laki-laki	39	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
32	Perempuan	38	S2	Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
33	Laki-laki	40	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	5
34	Perempuan	35	S2	Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
35	Perempuan	35	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
36	Laki-laki	45	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
37	Perempuan	44	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	5
38	Perempuan	36	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
39	Laki-laki	37	S2	Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
40	Laki-laki	43	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
41	Laki-laki	47	S2	Pejabat Penatausahaan Keuangan	5
42	Perempuan	36	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
43	Laki-laki	45	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
44	Laki-laki	46	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	1
45	Laki-laki	47	S2	Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
46	Laki-laki	48	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
47	Perempuan	37	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
48	Laki-laki	44	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
49	Laki-laki	36	S2	Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
50	Perempuan	38	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
51	Laki-laki	39	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan	1

No	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Lama Jabatan
				Keuangan	
52	Laki-laki	45	S2	Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
53	Laki-laki	40	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
54	Laki-laki	40	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
55	Laki-laki	39	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
56	Perempuan	39	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
57	Laki-laki	42	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
58	Laki-laki	42	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
59	Perempuan	35	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
60	Laki-laki	32	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
61	Perempuan	36	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
62	Perempuan	35	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	5
63	Perempuan	35	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
64	Laki-laki	32	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
65	Perempuan	38	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
66	Laki-laki	39	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	1
67	Laki-laki	45	S2	Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
68	Laki-laki	40	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
69	Laki-laki	40	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
70	Laki-laki	39	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
71	Perempuan	39	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
72	Perempuan	38	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
73	Laki-laki	39	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	1
74	Laki-laki	45	S2	Pejabat Penatausahaan Keuangan	3

No	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Lama Jabatan
75	Laki-laki	40	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
76	Laki-laki	40	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
77	Laki-laki	39	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
78	Perempuan	39	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
79	Laki-laki	45	S2	Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
80	Laki-laki	40	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
81	Laki-laki	40	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
82	Laki-laki	39	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
83	Perempuan	39	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
84	Laki-laki	45	S2	Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
85	Laki-laki	45	S2	Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
86	Laki-laki	40	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
87	Laki-laki	45	S2	Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
88	Laki-laki	40	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
89	Laki-laki	40	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
90	Laki-laki	39	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
91	Perempuan	39	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
92	Laki-laki	45	S2	Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
93	Laki-laki	40	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	3
94	Laki-laki	40	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	2
95	Laki-laki	39	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
96	Perempuan	39	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	4
97	Perempuan	38	S1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	3



<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Usia</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Lama Jabatan</b>
98	Laki-laki	39	S1	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	1



**LAMPIRAN 3. REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN**

**Kapasitas intelektual sumber daya manusia (X1)**

No	X 1.1	X 1.2	X 1.3	X 1.4	X 1.5	X 1.6	X 1.7	X 1.8	X 1.9
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	5	5	5	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	5	5	4	4	4	4	4	4	3
8	5	4	4	4	4	5	4	4	4
9	5	5	5	5	4	4	4	4	5
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	5	4	4	4	4	5	4	4	4
13	5	5	4	4	4	4	4	4	3
14	4	5	5	5	5	5	4	4	4
15	4	5	4	5	3	4	4	3	4
16	5	4	4	4	4	5	4	4	4
17	4	5	4	4	3	5	4	4	4
18	4	4	4	4	3	4	4	4	4
19	4	5	4	4	3	4	4	4	4
20	4	5	5	5	4	4	4	5	5
21	4	4	4	4	3	4	4	4	4
22	5	5	4	4	4	5	5	4	4
23	4	4	5	4	4	4	4	4	4
24	5	4	4	4	3	4	4	4	3
25	4	4	5	4	4	4	4	4	4
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	5	5	4	4	3	3	4	3	3
29	4	5	4	4	3	5	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	3	3	5	4	3
32	4	5	4	4	3	5	4	4	4
33	4	4	4	4	3	4	4	4	4
34	4	5	4	4	3	4	4	4	4
35	4	4	4	4	3	4	4	4	4
36	4	5	4	4	3	4	4	4	4
37	4	4	5	5	5	5	4	4	4
38	4	5	5	5	5	5	4	4	4

**Kapasitas intelektual sumber daya manusia (X1)**

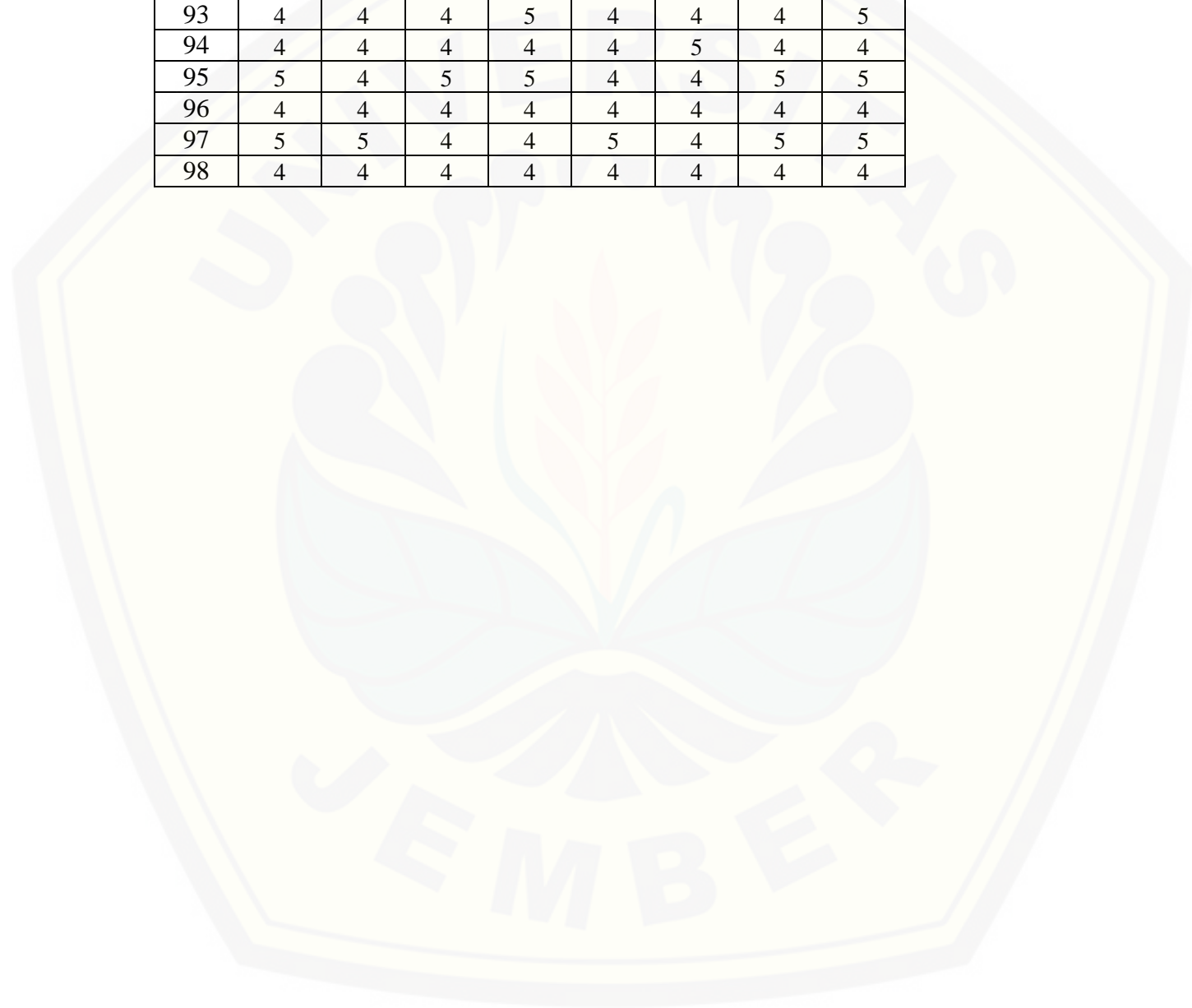
No	X 1.1	X 1.2	X 1.3	X 1.4	X 1.5	X 1.6	X 1.7	X 1.8	X 1.9
39	4	4	4	4	4	4	5	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	3	4
41	5	5	4	5	4	4	4	4	3
42	4	4	4	4	4	4	5	4	4
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5
44	4	5	4	5	4	4	4	4	4
45	5	5	5	5	5	5	4	5	5
46	5	5	5	5	5	5	5	5	5
47	5	5	5	5	5	4	4	4	4
48	4	5	4	4	4	4	4	4	4
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5
52	5	5	5	4	4	4	5	4	4
53	4	5	4	5	5	5	5	5	5
54	4	4	5	4	4	4	4	4	4
55	4	5	5	5	5	5	5	4	5
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	4	5	5	4	4	4	5	4	4
58	4	5	5	5	5	5	5	4	5
59	4	5	5	5	5	5	4	4	4
60	4	4	4	4	3	3	5	4	3
61	4	5	5	5	5	5	5	4	5
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	5	5	4	4	4	4	4	4	3
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66	5	5	4	4	3	3	4	3	3
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	4	5	4	4	4	4	4	4	4
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	4	5	5	5	5	5	4	4	4
71	4	5	4	5	3	4	4	3	4
72	5	4	4	4	4	5	4	4	4
73	4	5	4	4	3	5	4	4	4
74	5	5	4	4	4	4	4	4	3
75	5	4	4	4	4	5	4	4	4
76	5	5	5	5	4	4	4	4	5
77	5	5	5	5	4	5	5	4	5



No	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)							
	X 2.1	X 2.2	X 2.3	X 2.4	X 2.5	X 2.6	X 2.7	X 2.8
1	5	5	5	5	5	5	5	5
2	5	4	4	4	4	5	5	4
3	5	5	5	4	5	5	4	4
4	5	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	4	4	5	4
6	5	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	5	4
8	5	4	4	5	5	5	4	5
9	4	4	4	5	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4
11	5	4	3	4	4	4	4	4
12	5	4	4	5	5	5	4	5
13	4	4	4	4	4	4	5	4
14	5	3	5	5	5	5	5	5
15	5	5	5	5	5	5	5	5
16	5	4	4	5	5	5	4	5
17	4	4	4	4	5	4	4	4
18	5	5	5	5	5	5	5	5
19	5	5	5	5	5	5	5	5
20	4	4	5	4	5	5	5	5
21	5	5	5	5	5	5	5	5
22	4	3	3	3	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	5	5	4	4
25	5	5	5	5	5	5	5	5
26	5	5	5	5	5	5	5	5
27	5	5	5	5	5	5	5	5
28	4	3	3	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	5	4	5	5
30	5	5	5	5	5	5	5	5
31	4	4	4	4	4	5	5	5
32	4	4	4	4	5	4	4	4
33	5	5	5	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5	5	5	5
35	5	5	5	5	5	5	5	5
36	5	5	5	5	5	5	5	5
37	4	3	4	3	4	4	4	4
38	4	3	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4
40	5	5	5	5	5	5	5	5
41	4	4	4	4	5	5	5	4
42	4	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	3	5	5	4	4

44	5	5	5	5	5	5	5	5
45	4	4	4	4	5	5	4	4
46	4	4	4	5	5	5	5	5
47	4	4	4	3	4	4	4	4
48	4	3	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4	5	4	4
50	4	4	4	5	4	5	4	4
51	4	3	3	3	4	4	4	4
52	5	4	4	4	4	5	5	4
53	4	4	4	4	4	4	5	5
54	4	4	4	5	5	4	5	4
55	5	5	5	5	5	5	5	5
56	5	5	5	5	5	5	5	5
57	4	4	4	5	5	5	4	5
58	5	5	5	5	5	5	5	5
59	4	3	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	5	5	5
61	5	5	5	5	5	5	5	5
62	5	5	5	5	5	5	5	5
63	5	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4	5	4
65	5	5	5	5	5	5	5	5
66	4	3	3	4	4	4	4	4
67	5	4	4	4	4	4	4	4
68	5	5	5	5	4	4	5	4
69	5	4	4	4	4	4	4	4
70	5	3	5	5	5	5	5	5
71	5	5	5	5	5	5	5	5
72	5	4	4	5	5	5	4	5
73	4	4	4	4	5	4	4	4
74	4	4	4	4	4	4	5	4
75	5	4	4	5	5	5	4	5
76	4	4	4	5	4	4	4	4
77	4	4	4	4	5	4	4	4
78	4	3	3	3	4	4	4	4
79	5	5	5	5	5	5	5	5
80	4	4	5	4	5	5	5	5
81	5	5	5	5	5	5	5	5
82	4	4	4	4	5	4	4	4
83	5	5	5	5	5	5	5	5
84	5	5	5	5	5	5	5	5
85	4	4	5	4	5	5	5	5

86	5	5	5	4	5	5	4	4
87	5	4	4	4	4	4	4	4
88	5	5	5	5	4	4	5	4
89	5	4	4	4	4	4	4	4
90	4	4	4	4	4	4	5	4
91	4	4	4	4	5	4	4	4
92	4	3	3	3	4	4	4	4
93	4	4	4	5	4	4	4	5
94	4	4	4	4	4	5	4	4
95	5	4	5	5	4	4	5	5
96	4	4	4	4	4	4	4	4
97	5	5	4	4	5	4	5	5
98	4	4	4	4	4	4	4	4



No	Sistem Pengendalian Intern (X3)											
	X 3.1.1	X 3.1.2	X 3.1.3	X 3.1.4	X 3.1	X 3.2	X 3.3	X 3.4	X 3.5	X 3.6	X 3.7	X 3.8
1	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4
2	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
6	4	4	3	2	3	4	4	4	4	4	5	5
7	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
8	5	5	4	2	4	3	4	5	5	5	4	4
9	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4
10	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	3	3	5	4	4	4	4
12	5	5	4	2	4	3	4	5	5	5	4	4
13	4	4	4	2	4	4	4	5	4	5	5	5
14	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
15	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4
16	5	5	4	5	5	3	4	5	5	5	4	4
17	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4
18	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4
19	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4
20	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4
21	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4
22	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4
23	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
26	5	5	2	2	4	5	5	5	5	5	5	5
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4
30	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4
32	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4
33	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4
34	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4
35	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4
36	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4
37	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
38	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
39	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4





88	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5
89	4	4	3	2	3	4	4	4	4	4	5	5
90	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
91	4	5	5	5	4	3	4	4	4	3	4	4
92	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
93	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4
94	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	2
95	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
97	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	2	5
98	3	2	3	4	4	4	4	4	5	5	4	5





39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5
41	4	4	4	4	4	5	5	3	5	5
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5
44	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4
45	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
46	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5
47	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4
48	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5
49	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
50	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4
51	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
53	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5
54	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5
55	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
56	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5
57	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4
61	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
62	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5
63	4	5	5	5	4	4	4	3	2	4
64	2	4	4	4	5	4	5	5	5	5
65	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	2	5	5	5	5	4	5	4	4	5
69	4	5	5	5	4	4	4	3	2	4
70	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
71	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
72	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4
73	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4
74	2	4	4	4	5	4	5	5	5	5
75	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5
76	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4
77	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4
78	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4
79	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4

80	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4
81	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
82	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4
83	4	3	5	5	5	5	5	5	4	4
84	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4
85	5	4	5	5	5	4	4	4	5	4
86	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
88	2	5	5	5	5	4	5	4	4	5
89	4	5	5	5	4	4	4	3	2	4
90	2	4	4	4	5	4	5	5	5	5
91	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4
92	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4
93	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4
94	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4
95	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
96	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4
97	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5
98	5	5	4	4	4	3	2	4	5	4

**LAMPIRAN 4. HASIL UJI VALIDITAS**

a. Kapasitas intelektual sumber daya manusia

		Correlations									
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,257	,087	,113	,207	,202	,246	,061	,007	,444
	Sig. (2-tailed)		,011	,393	,266	,041	,046	,015	,553	,947	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X1.2	Pearson Correlation	,257	1	,345	,469	,087	,276	,185	,085	,183	,556
	Sig. (2-tailed)	,011		,000	,000	,396	,006	,068	,407	,071	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X1.3	Pearson Correlation	,087	,345	1	,628	,509	,244	,246	,322	,549	,707
	Sig. (2-tailed)	,393	,000		,000	,000	,016	,015	,001	,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X1.4	Pearson Correlation	,113	,469	,628	1	,523	,375	,200	,218	,539	,748
	Sig. (2-tailed)	,266	,000	,000		,000	,000	,049	,031	,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X1.5	Pearson Correlation	,207	,087	,509	,523	1	,390	,216	,308	,392	,722
	Sig. (2-tailed)	,041	,396	,000	,000		,000	,033	,002	,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X1.6	Pearson Correlation	,202	,276	,244	,375	,390	1	,193	,215	,388	,627
	Sig. (2-tailed)	,046	,006	,016	,000	,000		,057	,033	,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X1.7	Pearson Correlation	,246	,185	,246	,200	,216	,193	1	,197	,209	,473
	Sig. (2-tailed)	,015	,068	,015	,049	,033	,057		,052	,039	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X1.8	Pearson Correlation	,061	,085	,322	,218	,308	,215	,197	1	,482	,483
	Sig. (2-tailed)	,553	,407	,001	,031	,002	,033	,052		,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X1.9	Pearson Correlation	,007	,183	,549	,539	,392	,388	,209	,482	1	,574
	Sig. (2-tailed)	,947	,071	,000	,000	,000	,000	,039	,000		,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X1	Pearson Correlation	,444	,556	,707	,748	,722	,627	,473	,483	,574	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98

. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

		Correlations								
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,535	,426	,502	,258	,442	,449	,535	,707
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,010	,000	,000	,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X2.2	Pearson Correlation	,535	1	,684	,519	,429	,426	,474	,370	,776
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X2.3	Pearson Correlation	,426	,684	1	,590	,436	,463	,528	,432	,796
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X2.4	Pearson Correlation	,502	,519	,590	1	,374	,366	,388	,553	,752
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X2.5	Pearson Correlation	,258	,429	,436	,374	1	,610	,185	,385	,638
	Sig. (2-tailed)	,010	,000	,000	,000		,000	,068	,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
2.6	Pearson Correlation	,442	,426	,463	,366	,610	1	,374	,535	,723
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X2.7	Pearson Correlation	,449	,474	,528	,388	,185	,374	1	,544	,668
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,068	,000		,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X2.8	Pearson Correlation	,535	,370	,432	,553	,385	,535	,544	1	,737
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X2	Pearson Correlation	,707	,776	,796	,752	,638	,723	,668	,737	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98

. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

		Correlations								
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,229	-,097	,086	,053	,248	,101	-,070	,726
	Sig. (2-tailed)		,023	,343	,402	,607	,014	,324	,493	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X3.2	Pearson Correlation	,229	1	,276	,238	,153	,115	,229	,210	,618
	Sig. (2-tailed)	,023		,006	,018	,133	,298	,023	,038	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X3.3	Pearson Correlation	-,097	,276	1	,428	,471	,321	,004	,159	,512
	Sig. (2-tailed)	,343	,006		,000	,000	,001	,970	,117	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X3.4	Pearson Correlation	,086	,238	,428	1	,554	,473	,302	,159	,492
	Sig. (2-tailed)	,402	,018	,000		,000	,000	,003	,117	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X3.5	Pearson Correlation	,053	,153	,471	,554	1	,705	,328	,315	,576
	Sig. (2-tailed)	,607	,133	,000	,000		,000	,001	,002	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X3.6	Pearson Correlation	,248	,115	,321	,473	,705	1	,383	,325	,626
	Sig. (2-tailed)	,014	,298	,001	,000	,000		,000	,001	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X3.7	Pearson Correlation	,101	,229	,004	,302	,328	,383	1	,519	,611
	Sig. (2-tailed)	,324	,023	,970	,003	,001	,000		,000	,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X3.8	Pearson Correlation	-,070	,210	,159	,159	,315	,325	,519	1	,669
	Sig. (2-tailed)	,493	,038	,117	,117	,002	,001	,000		,000
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98
X3	Pearson Correlation	,726	,618	,512	,492	,576	,626	,611	,669	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98

. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).





N	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
- . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



**LAMPIRAN 5. HASIL UJI RELIABILITAS**

a. Kapasitas intelektual sumber daya manusia

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,771	10

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,777	9

c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,705	9

d. Nilai Informasi Laporan Keuangan

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,728	11

**LAMPIRAN 6. HASIL UJI ASUMSI KLASIK**

**a. Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		X1	X2	X3	Y
N		98	98	98	98
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	39,91	36,88	35,67	43,88
	Std. Deviation	3,546	4,746	2,438	3,239
	Absolute	,156	,125	,121	,126
Most Extreme Differences	Positive	,156	,125	,121	,126
	Negative	-,148	-,124	-,105	-,084
Kolmogorov-Smirnov Z		1,392	,945	,939	,995
Asymp. Sig. (2-tailed)		,317	,328	,365	,337

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

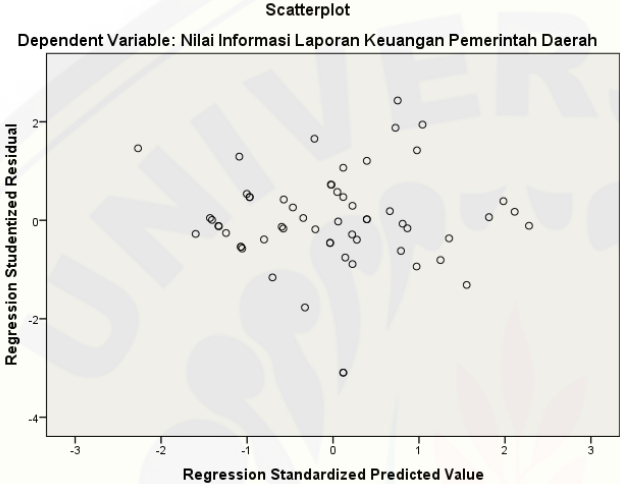
**b. Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Std. Coeff	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
	(Constant)	2,668	,086					
1	Kapasitas intelektual sumber daya manusia	,223	,090	,223	2,476	,015	,911	1,097
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,240	,094	,240	2,541	,013	,834	1,198
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	,329	,097	,329	3,393	,001	,788	1,268

a. Dependent Variable: Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

**c. Uji Heterokedastisitas**



**LAMPIRAN 7. HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA**

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kapasitas intelektual sumber daya manusia <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,854 <sup>a</sup>	,729	,713	,53527910	1,725

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kapasitas intelektual sumber daya manusia

b. Dependent Variable: Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29,384	3	9,795	13,616	,000 <sup>b</sup>
	Residual	67,616	94	,719		
	Total	97,000	97			

a. Dependent Variable: Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kapasitas intelektual sumber daya manusia

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Std. Coeff	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
	1	(Constant)	2,668	,086		,000	1,000	
	Kapasitas intelektual sumber daya manusia	,223	,090	,223	2,476	,015	,911	1,097
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,240	,094	,240	2,541	,013	,834	1,198
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	,329	,097	,329	3,393	,001	,788	1,268

a. Dependent Variable: Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah